

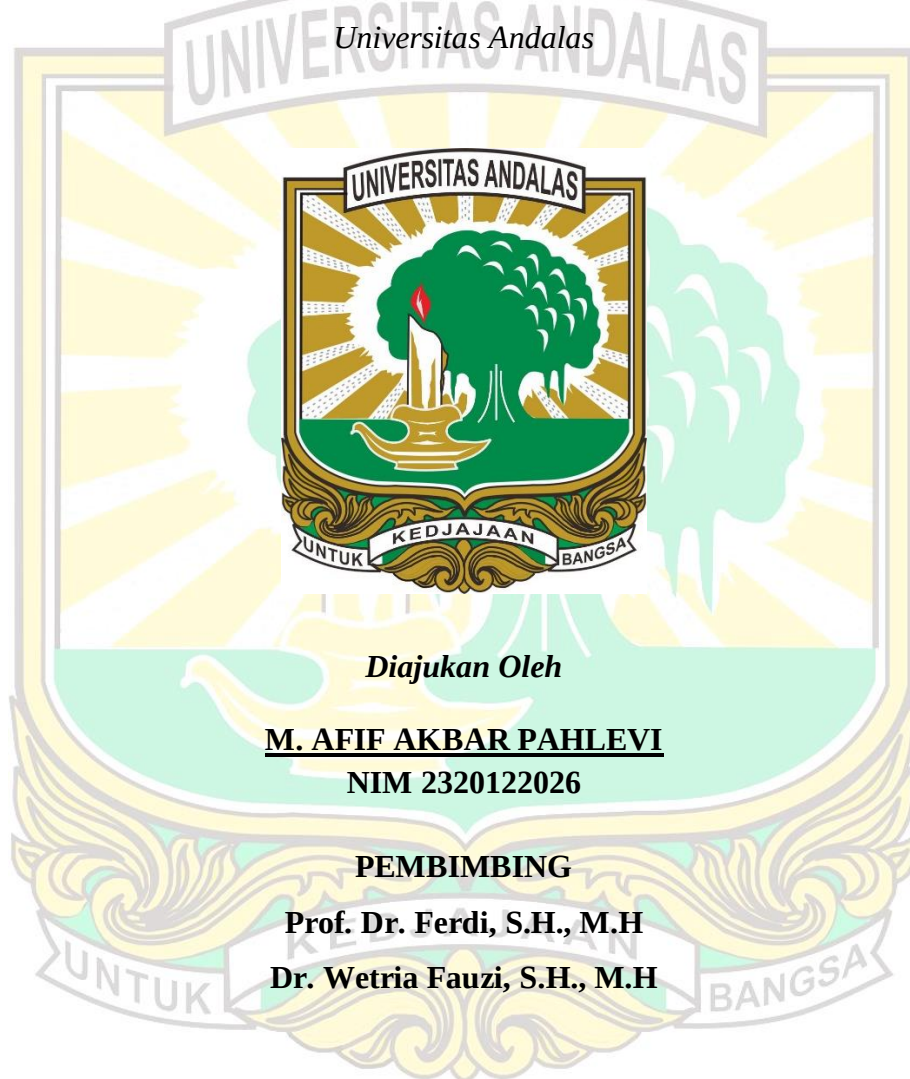
**PENOLAKAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA OLEH NOTARIS YANG DITUNJUK
MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Andalas



Diajukan Oleh

M. AFIF AKBAR PAHLEVI

NIM 2320122026

PEMBIMBING

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

**HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET**

No.Reg:54/MKN/2/2026

**PENOLAKAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
OLEH NOTARIS YANG DITUNJUK MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

**REFUSAL TO ACCEPT THE TRANSFER OF A DECEASED NOTARY'S PROTOCOL BY A NOTARY
APPOINTED BY THE REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL**

Disusun Oleh:

Author:

M Afif Akbar Pahlevi

2320122026

Program Studi : Magister Kenotariatan

Study Program : Master Of Notary

**Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Januari 2026 Dan
Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

***This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On June 29th, 2026 And
Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:***

**Pembimbing I
Supervisor I**

**Pembimbing II
Supervisor II**

**Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum
NIP. 196807231993021001**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H
NIP.197807302000122001**

**Penguji I
Examiner I**

**Penguji II
Examiner II**

**Penguji III
Examiner III**

**Prof.Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H
NIP. 196911181994031002**

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001**

Helsi Yasin, S.H., M.Kn

**Dekan
Dean**

**Ketua Program Studi
Head Of Study Program**

**Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001**

**Dr. Yussy A Mannas, S.H., M.H
NIP 198402182008012002**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M AFIF AKBAR PAHLEVI**

Nomor Induk Mahasiswa : **2320122026**

Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **PENOLAKAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NOTARIS YANG DITUNJUK MAJELIS PENGAWAS DAERAH** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan saya dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya

Padang, 30 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan

M. AFIF AKBAR PAHLEVI
2320122026

**PENOLAKAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA OLEH NOTARIS YANG DITUNJUK
MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

**(M Afif Akbar Pahlevi, NIM 2020122026, Program Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 108, 2026)**

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara protokol notaris sebagai arsip negara. Dalam hal notaris meninggal dunia, protokol notaris wajib dialihkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya penolakan dari notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini : 1.apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan peralihan protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh notaris yang ditunjuk majelis pengawas daerah? 2.bagaimana akibat hukum apabila notaris yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah menolak menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia? 3.bagaimana upaya yang dilakukan majelis pengawas daerah dalam menghadapi notaris yang menolak menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia? adapun metode penelitiannya adalah Metode Pendekatan metode pendekatan yuridis empiris (*emphrical legal research*). sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Penolakan penerimaan protokol notaris merupakan pelanggaran kewajiban jabatan yang berpotensi dikenai sanksi administratif, dipengaruhi oleh beban tanggung jawab hukum, keterbatasan sarana, dan risiko hukum akta, serta ditangani MPD melalui pembinaan, teguran, dan sanksi administratif untuk menjamin kepastian hukum. Adapun rekomendasinya adalah Diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai prosedur pelimpahan protokol notaris beserta konsekuensi hukum atas penolakan penerimaannya, disertai pelatihan, pendampingan, serta peningkatan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah secara proaktif melalui mekanisme pendokumentasian dan monitoring guna meningkatkan pemahaman, kepatuhan, manajemen risiko hukum, dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Penolakan Protokol

***REFUSAL TO ACCEPT THE TRANSFER OF A DECEASED NOTARY'S
PROTOCOL BY A NOTARY APPOINTED BY THE REGIONAL
SUPERVISORY COUNCIL.***

***(M Afif Akbar Pahlevi, Student ID 2020122026, Master of Notary Program,
Faculty of Law, Andalas University, Total Pages: 108, 2026)***

ABSTRACT

A notary, as a public official, has the obligation to safeguard and maintain the notarial protocol as a state archive. In the event that a notary passes away, the notarial protocol must be transferred to another notary appointed by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah/MPD). However, in practice, there are still instances where the appointed notary refuses to accept the notarial protocol of the deceased notary, which may lead to legal uncertainty and hinder public legal services. the research problems formulated in this study are as follows: 1.what factors influence the refusal to accept the transfer of a notarial protocol from a deceased notary by a notary appointed by the regional supervisory council? 2.what are the legal consequences if a notary appointed by the regional supervisory council refuses to accept the notarial protocol of a deceased notary? 3.what measures are taken by the regional supervisory council in dealing with a notary who refuses to accept the notarial protocol of a deceased notary? this study employs an empirical juridical approach (empirical legal research) and is descriptive-analytical in nature. The results of the study indicate that refusal to accept a notarial protocol constitutes a violation of notarial duties and may result in administrative sanctions. Such refusal is influenced by factors including the burden of legal responsibility, limitations in facilities and infrastructure, and legal risks associated with notarial deeds. The Regional Supervisory Council addresses this issue through guidance, warnings, and the imposition of administrative sanctions in order to ensure legal certainty. The study recommends strengthening regulations and enhancing socialization regarding procedures for the transfer of notarial protocols and the legal consequences of refusal, accompanied by training and assistance for notaries, as well as the proactive enhancement of the supervisory function of the Regional Supervisory Council through documentation and monitoring mechanisms to improve understanding, compliance, legal risk management, and legal certainty.

Keywords: Notary, Notarial Protocol, Regional Supervisory Council, Refusal of Protocol Transfer.

KATA PENGANTAR



Alhamdullillahirrobbil'alamin, Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik yang berjudul **PENOLAKAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NOTARIS YANG DITUNJUK MAJELIS PENGAWAS DAERAH.** Shalawat beriringan salam tak lupa selalu penulis bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah contoh dari suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Tesis ini penulis selesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Di dalam penulisan ini, mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak sekali pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide dan bahkan juga fasilitas moral dan materil. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari tahap awal sampai tahap akhir penyusunan tesis ini. Rasanya penulis tidak mampu membalas jasa mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan Rahmat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Untuk itu tesis ini penulis persembahkan terutama kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Takdir Nasrob dan Ibunda Sri Minarni yang merupakan motivasi terbesar penulis dalam menulis tesis ini, serta ucapan terimakasih yang sangat mendalam karena telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa terbaik sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini. Selanjutnya dorongan semangat dan kasih sayang dari kakak dan abang penulis yaitu Tari Nasawida, Metha Dian Puspa Nasawida dan Ongwie Hocky Sekani. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H. dan Ibu Helsi Yasin, S.H. M.Kn selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar tesis ini lebih sempurna. Semoga ALLAH SWT memberikan balasan pahala yang berlimpah kepada Bapak dan Ibu.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Efa Yonnedi., S.E, MPPM, Akt, CA, CRGP, selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Prof., Dr. Ferdi., S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Andalas.

4. Ibu Dr. Yussy Adelina Manas, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Program Magister Kenotariatan beserta Ibu Dr. Misnar Syam S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan dan jajaran karyawan yang telah memberikan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Seluruh civitas akademi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2023 tanpa terkecuali.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan pada penulisan tesis ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kebaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan tesis ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang,

2026

M. Afif Akbar Pahlevi
2320122026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	17
1. Kerangka Teoritis	17
2. Kerangka Konseptual	25
G. Metode Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Jabatan Notaris	36
B. Protokol Notaris	39
C. Pelimpahan Protokol Notaris	42
D. Penolakan Dalam Hukum	46
E. Tanggung Jawab dan Etika Profesi	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penolakan Peralihan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Notaris Yang Ditunjuk Majelis Pengawas Daerah	52
1. Faktor Profesional dan Teknis Kenotariatan.....	52
2. Faktor Yuridis dan Regulasi Hukum	56
3. Faktor Administratif dan Infrastruktur Kantor.....	64
4. Faktor Psikologis dan Pertimbangan Risiko Hukum.....	65

B. Akibat Hukum Apabila Notaris Yang Ditunjuk Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Menolak Menerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	67
1. Kedudukan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dan Objek Pengawasan	67
2. Kewajiban Hukum Notaris Penerima Protokol dan Dasar Hukumnya	78
3. Akibat Hukum Penolakan Penerimaan Protokol oleh Notaris yang Ditunjuk	87
4. Sanksi dan Tanggung Jawab Hukum Notaris yang Menolak Menerima Protokol	91
C. Upaya Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Dalam Menghadapi Notaris Yang Menolak Menerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	98
1. Upaya Pencegahan Majelis Pengawas Daerah	98
2. Upaya Penindakan Majelis Pengawas Daerah	100
3. Upaya Solutif dan Alternatif Penyelesaian	104
BAB IV PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	